

**HUKUM EKONOMI SYARI'AH TENTANG UPAH ANGKUT  
KELAPA SAWIT**

**(Studi Kasus di Lapak Sawit Panji Desa Negeri Besar  
Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh:

**ANGGI SUSANTY**

**NPM: 1721030114**



**Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1442/2021**

**HUKUM EKONOMI SYARI'AH TENTANG UPAH ANGKUT  
KELAPA SAWIT**

**(Studi Kasus di Lapak Sawit Panji Desa Negeri Besar  
Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

**ANGGI SUSANTY**

**NPM:1721030114**

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Pembimbing I : Drs. H. Chaidir Nasution, M.H

Pembimbing II : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I.

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1442/2021**

## ABSTRAK

*Ujroh* (upah-mengupah) merupakan lingkup muamalah dalam hukum Islam. Perkembangan upah-mengupah tidak asing lagi dimasyarakat, dalam pemenuhan kebutuhan yang beragam tidak mungkin manusia dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga membutuhkan orang lain. Sama halnya dengan pemilik lapak sawit dengan kuli angkut yang saling membutuhkan, pemilik lapak membutuhkan kuli angkut untuk menjalankan usahanya, sedangkan kuli angkut membutuhkan pekerjaan tersebut untuk memenuhi kebutuhannya, dengan mendapatkan imbalan (upah) dari pemilik lapak sawit. Upah ditetapkan berdasarkan jenis dan kesulitan pekerjaan serta disepakati kedua belah pihak, dan pemberian upah dilakukan setelah pekerjaan selesai dilakukan. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah: bagaimana penetapan upah angkut kelapa sawit di lapak sawit panji Desa Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan dan bagaimana pandangan hukum ekonomi syari'ah tentang upah angkut kelapa sawit di lapak sawit panji Desa Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan. Sedangkan tujuan penelitian ini untuk mengetahui penetapan upah angkut di lapak sawit panji Desa Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan, dan untuk mengetahui pandangan hukum ekonomi syari'ah tentang upah angkut di lapak sawit panji Desa Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan. Adapun Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data yang diperoleh dari lokasi atau lapangan dan dianalisis secara deskriptif analisis yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan objek yang diteliti. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Setelah data dianalisis maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif dengan analisis kualitatif kemudian akan diambil kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dengan pendekatan berpikir induktif dan deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, penetapan upah angkut kelapa sawit di lapak sawit panji Desa Negeri Besar, didasarkan pada jumlah kg (berat) buah sawit yang diangkut dengan mempertimbangkan kesulitan (medan/lapangan) yang dilalui. Dalam pandangan hukum ekonomi syari'ah, Islam mengajarkan bahwa dalam upah-mengupah (*ujroh*) harus sesuai dengan perjanjian di awal, yang terjadi di lapak sawit panji kesepakatan besaran upah tidak dipenuhi sebagaimana kesepakatan awal. Oleh karenanya, upah-mengupah yang terjadi di lapak sawit panji desa Negeri Besar menjadi fasid (rusak) dan tidak sah.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anggi Susanty  
NPM : 1721030114  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Hukum Ekonomi Syari'ah Tentang Upah Angkut kelapa Sawit (Studi di Lapak Sawit Panji Desa Negeri Besar, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan)** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, September 2021

Penulis,



Anggi Susanty

1721030114





**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

**Alamat: Jl. Let. Kol. H.Suratmin Sukarama Bandar Lampung Telp (0721 )70326**

**PERSETUJUAN**

**Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi  
sebagaimana mestinya terhadap skripsi saudara :**

**Nama : Anggi Susanty**

**NPM : 1721030114**

**Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah**

**Fakultas : Syari'ah**

**Judul : HUKUM EKONOMI SYARI'AH TENTANG  
UPAH ANGKUT KELAPA SAWIT (Studi Kasus  
di Lapak Sawit Panji Desa Negeri Besar  
Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan)**

**MENYETUJUI**

**Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang  
munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Drs. H. Chaidir Nasution, M.H**

**NIP. 195802011986031002**

**Herlina Kurniati, S.H., M.E.I**

**NIP.**

**Mengetahui,  
Ketua Prodi Muamalah**

**Khoiruddin, M.S.I**

**NIP. 197807252009121002**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

**Alamat: Jl. Let. Kol. H.Suratmin Sukaramé Bandar Lampung Telp (0721) 70326**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG UPAH ANGKUT KELAPA SAWIT (Studi Kasus di Lapak Sawit Panji Desa Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan)** disusun oleh **Anggi Susanty NPM 1721030114** program studi **Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)** telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: Selasa, 28 September 2021

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Eti Karini, S.H., M.Hum.**



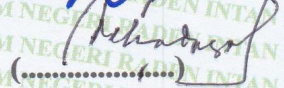
**Sekretaris : Muslim, S.H.I., M.H.I.**



**Penguji I : Dr.H.A.Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H.**



**Penguji II : Drs. H.Chaidir Nasution, M.H.**



**Penguji III : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I**



**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Syari'ah**

**Drs. H. Khairuddin, M. H**

**NIP. 196210221993031002**



## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

*“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”  
(Q.S Al-Maidah (5): 1)*



## PERSEMBAHAN

Dengan segala rasa syukur dan bahagia yang begitu mendalam kupersembahkan karya ini kepada orang-orang yang telah memberikan arti dalam perjalanan hidupku :

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat serta rahmat-Nya dan kesehatan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada kedua orang tuaku, Papah tercinta Firdaus dan Mama tercinta Nurlaila S.Pd. Terimakasih karena telah membimbing, mendidik, memberi semangat, motivasi dan memberikan kesempatan pendidikan terbaik untukku, dan juga telah memberikan cinta dan kasih sayang yang tak terhingga untukku, terimakasih atas setiap doa yang selalu dipanjatkan untuk kelancaran dan kesuksesanku, Terimakasih banyak kalian adalah orang tua terbaik dalam hidupku.
3. Nenekku Hasanah dan Hasimah tercinta yang terus menyayangi dan mendoakan cucunya.
4. Kakakku tercinta Fitri Novita Sari, S.Pd, Reny Octavia, S.Pd, Intan Sonia, S.Pd, yang selalu mendoakan, mendukung dan memberi semangat kepadaku untuk terus menyelesaikan kuliahku.
5. Kakak iparku tercinta pinan Ahmad Novian, yose Ali Rohman, Serta keponakan ku tercinta Muhammad Aditya Nauval Al-vian, Afif Abbas Al-vian, Alesha Khoirunnisa, yang tiada hentinya memberikan dukungan dan mendoakan ku selama ini.
6. Untuk Hadi Rohman, terimakasih sudah memberiku semangat dan selalu ada dalam situasi apapun dan mendoakan ku selama ini.
7. Seluruh keluarga basarku dan saudaraku yang telah mendukung dan mendoakan saya.
8. Almamater tercinta.

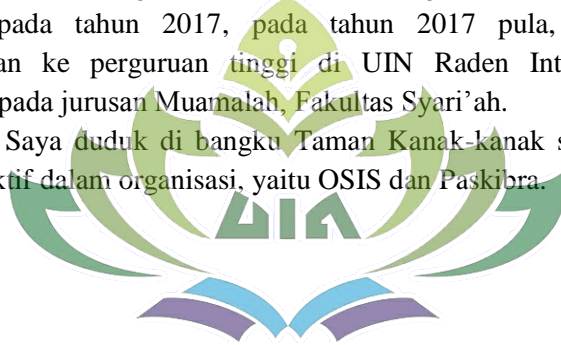


## RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap adalah Anggi Susanty dilahirkan di Jakarta, 28 September 1998. Merupakan anak keempat dari empat bersaudara, dari pasangan yang bernama Firdaus (papah) dan Nurlaila S.Pd. (mama). Penulis mempunyai saudara kandung yaitu Futri Novita Sari S.Pd, Reny Octavia S.Pd, Intan Sonia S.Pd.

Mengawali pendidikan di Taman Kanak-kanak Nurul Huda (TK) Negeri Besar, Way Kanan. Selesai pada tahun 2005, setelah itu melanjutkan pada Sekolah Dasar Negeri 01 (SDN01) Negeri Besar, Way Kanan. selesai pada tahun 2011, setelah itu melanjutkan lagi di Madrasah Tsanawiah Al-Fatah (MTS) Muhajirun, Natar Lampung selatan. Selesai pada tahun 2014, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas Negeri 01 (SMAN01) Negeri Besar, Way Kanan. Selesai pada tahun 2017, pada tahun 2017 pula, melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di UIN Raden Intan Lampung tepatnya pada jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah.

Saya duduk di bangku Taman Kanak-kanak sampai SMA, pernah aktif dalam organisasi, yaitu OSIS dan Paskibra.



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Puji syukur kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat dan karunianya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, guna memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, dengan judul skripsi: "Hukum Ekonomi Syari'ah Tentang Upah Angkut Kelapa Sawit (Studi kasus di Lapak Sawit Panji Desa Negeri Besar, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan)." Shalawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang semoga kita diberikan syafaatnya di yaumul akhir nanti.

Dalam pembuatan skripsi ini, tentunya banyak sekali proses yang harus dilalui, dengan berbagai kesulitan dan kemudahan yang dijalani. Pada kesempatan ini, ingin menghaturkan rasa terimakasih setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Khairuddin Tahmid, M.H selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
2. Bapak Khoiruddin, M.S.I selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Ibu Juhrotul Khulwah M.S.I selaku Sekretaris Jurusan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Drs. H. Chaidir Nasution, M.H selaku pembimbing I dan Ibu Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I. selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah yang telah banyak mendidik, memberikan ilmu, dan memberikan banyak pengalaman selama menuntut ilmu di Fakultas ini.
5. Kepala Perpustakaan, petugas akademik, dan segenap civitas akademika Fakultas Syari'ah yang baik secara langsung maupun tidak langsung, telah terlibat dan banyak membantu pembuatan skripsi ini.
6. Guru-guru ku tercinta dari Sekolah Taman Kanak-kanak sampai Sekolah Menengah Atas yang telah mengajarkan ku banyak hal

sehingga dapat membaca dan menulis dan mengetahui banyak hal hingga dapat masuk di perguruan tinggi ini.

7. Sahabatku Rika Wulan d, dan Resti Diana f, yang tiada hentinya mendoakan dan memberikan dukungan selama ini.
8. Sahabat-sahabatku kak Alya, Elis, Rias, Ima, Lutfiyah, lala. Dan teman-teman seperjuanganku, khususnya keluarga besar **Muamalah D**, Yang senantiasa menemani, dan berjuang bersama dalam segenap proses di perguruan tinggi ini.

Akhirnya, dengan iringan terimakasih penulis memanjatkan doa atas kehadiran Allah SWT, semoga jerih payah dan amal bapak, ibu dan teman-teman sekalian mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya kepada pembaca. Aamiin ya Allah.

*Wassalamu'alaikum, Wr, Wb.*





## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
SURAT PERNYATAAN .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN .....	vii
RIWAYAT HIDUP .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR TABEL .....	xiii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	2
C. Latar Belakang Masalah .....	2
D. Fokus Penelitian .....	4
E. Rumusan Masalah .....	5
F. Tujuan Penelitian .....	5
G. Signifikasi Penelitian .....	5
H. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	6
I. Metode Penelitian .....	8
J. Sistematika Pembahasan .....	12

### BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian dan Dasar Upah ( <i>Ujroh</i> ) .....	15
B. Syarat dan Rukun Upah ( <i>Ujroh</i> ) .....	28
C. Macam-macam Upah ( <i>Ujroh</i> ) .....	33
D. Kewajiban dan Hak Masing-masing Pihak .....	37
E. Sistem Pengupahan, Pelaksanaan dan Gugurnya upah ( <i>Ujroh</i> ) .....	38
F. Berakhirnya Akad upah ( <i>Ujroh</i> ) .....	46

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
1. Sejarah SingkatDesa Negeri Besar .....	47
2. Kondisi Geografis dan Demokrafis .....	47
3. Sejarah Berdirinya Lapak Sawit Panji .....	52
B. Praktik Upah Angkut Kelapa Sawit di Lapak Sawit Panji .....	53

### **BAB IV ANALISIS DATA**

A. Praktik Upah Angkut Kelapa Sawit di Lapak Sawit Panji .....	61
B. Hukum Ekonomi Syari'ah Tentang Upah Angkut Kelapa Sawit di Lapak Sawit Panji .....	63

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	76
B. Saran.....	76

### **DAFTAR RUJUKAN**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Tata Guna Tanah .....	53
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin .....	54
Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Menurut Agama.....	54
Tabel 3.4 Jumlah Tingkat Pendidikan Penduduk.....	55
Tabel 3.5 Jumlah Mata Pencarian Penduduk .....	56





# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Mengenai permasalahan judul skripsi ini, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian judul guna tidak terjadi pemahaman yang berbeda dikalangan pembaca. Penelitian yang akan dilaksanakan ini untuk penulisan skripsi yang berjudul **Hukum Ekonomi Syari'ah Tentang Upah Angkut Kelapa Sawit (Studi Kasus di Lapak Sawit Panji Desa Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan)**. Ada beberapa pengertian dalam judul dimaksud yang perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. Hukum Ekonomi Syari'ah adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia berupa perjanjian atau kontrak, berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek atau benda-benda ekonomi dan berkaitan dengan ketentuan hukum terhadap benda-benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi.<sup>1</sup>
2. Upah Angkut Kelapa Sawit, upah adalah imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.<sup>2</sup> Jadi, upah angkut Kelapa Sawit adalah imbalan yang diberikan kepada seseorang yang telah bekerja dengan mengangkat, memuat, dan membawa kelapa sawit dari satu tempat ke tempat yang telah ditentukan sesuai dengan perjanjian kerja.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa maksud dari judul skripsi ini adalah Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Syari'ah Tentang Upah Angkut Kelapa Sawit (

---

<sup>1</sup>Arifin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta: Pramuda Jakarta, 2008), h.73

<sup>2</sup> Kumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam*, (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), h.114

Studi Kasus di Lapak Sawit Panji Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan ).

## **B. Alasan Memilih Judul**

Ada beberapa alasan mengapa penulis memilih judul tersebut yaitu:

### **1. Alasan Objektif**

- a. Bahwa salah satu pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Negeri Besar yaitu menjadi kuli angkut kelapa sawit. Namun upah yang diberikan oleh pemilik lapak kelapa sawit tidak sesuai dengan apa yang sudah disepakati bersama. Dalam pelaksanaannya besaran upah yang diterima lebih kecil dari kesepakatan pada awal perjanjian kerja.
- b. Masalah upah sangatlah penting dan dampaknya sangat luas. Jika para pekerja tidak menerima upah yang adil dan pantas, maka akan mempengaruhi kebutuhan kehidupan para pekerja dan keluarga mereka.

### **2. Alasan Subjektif**

- a. Referensi yang terkait di dalam penelitian ini cukup menunjang sehingga dapat mempermudah penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
- b. Ditinjau dari lingkup/bidang bahasan, judul skripsi ini sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari bidang Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

## **C. Latar Belakang**

Dalam upaya pemenuhan kebutuhan yang beragam tidak mungkin manusia dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga ia membutuhkan orang lain untuk saling berbagi kemanfaatan di dalam segala urusan. Hubungan manusia ini dikenal sebagai Muamalah. Dimaksud dengan muamalah adalah

aturan hukum Allah untuk mengatur manusia dalam urusan duniawi dalam pergaulan sosial.

Salah satu kegiatan muamalah yang banyak dilakukan manusia khususnya dalam bidang ekonomi adalah upah-mengupah, mengenai praktek upah mengupah biasanya dikaitkan dengan akad ijarah. Ijarah sendiri merupakan transaksi yang terkait manfaat suatu benda. Objek transaksi pada ijarah adalah jasa, baik manfaat atas barang maupun manfaat atas tenaga.

Perkembangan praktek upah-mengupah mungkin sudah tidak asing lagi di masyarakat, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Banyak cara dilakukan untuk mencari uang demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, salah satunya dengan bekerja menjadi kuli angkut kelapa sawit di Lapak Sawit Panji Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan.

Kuli angkut kelapa sawit adalah seorang yang bekerja sebagai kuli yang mengangkat, memuat, dan membawa kelapa sawit dari satu tempat ke tempat lainnya. Pemilik lapak sawit menggunakan jasa para kuli angkut untuk membantu mengangkut kelapa sawit dari kebun-kebun para petani sawit menuju ke lapak sawit panji, yang nantinya para kuli angkut akan mendapatkan imbalan atau upah atas manfaat jasa yang telah diberikan atau dikeluarkan. Ini merupakan salah satu hubungan manusia yang disebut muamalah.

Para kuli angkut harus mulai bekerja dari pagi hari dan selesai hingga sore bahkan malam hari, ini tergantung seberapa banyak jumlah tonase kelapa sawit yang mereka angkut pada hari itu. Setiap hari kuli angkut akan mengangkut kelapa sawit hasil panen dari kebun para petani sawit yang berbeda-besa setiap harinya.

Untuk mengangkut kelapa sawit yang harus menyebrangi sungai, para kuli angkut menggunakan perahu berukuran besar dan untuk mengangkut kelapa sawit yang di darat para kuli angkut menggunakan mobil truk. Para kuli angkut juga menggunakan motor atau angkong (gerobak dorong) untuk mengangkut kelapa sawit dari dalam kebun menuju pinggir jalan atau sungai tempat mobil truk atau perahu berada.



Berdasarkan kesepakatan bersama, upah angkut kelapa sawit diberikan sesuai dengan kebiasaan upah-mengupah yang terjadi di masyarakat sekitar. atau tergantung dengan jaraknya, jauh dan dekat upahnya akan berbeda, dan upah yang diberikan juga dihitung menurut pertonnya. Jadi selain dilihat dari jarak dan tingkat kesulitannya upahnya juga diberikan dihitung pertonnya. Mengenai waktu pembayaran upah dibayar setelah pekerjaannya selesai di kerjakan.

Kuli angkut kelapa sawit sudah menjalankan dan memenuhi kewajibannya dengan menyelesaikan pekerjaan dengan baik, namun upah yang di berikan oleh pemilik lapak kelapa sawit tidak sesuai dengan apa yang sudah disepakati bersama, dalam prakteknya besaran upah yang diterima tidak sama seperti kesepakatan awal perjanjian kerja.

Dalam perjanjiannya upah akan diberikan sama sesuai dengan kebiasaan upah-mengupah yang sering terjadi di masyarakat, sehingga tidak akan ada yang dirugikan antara kedua belah pihak, tetapi kenyataannya nominal upah diberikan sesuai dengan penetapan yang telah ditentukan oleh pemilik lapak itu sendiri bukan sesuai kesepakatan bersama.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang : Hukum Ekonomi Syari'ah Tentang Upah Angkut Kelapa Sawit (Studi Kasus di Lapak Sawit Panji Desa Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan ).

#### **D. Fokus Penelitian**

Dalam sebuah penelitian atau *research* yang bertujuan untuk mencari sesuatu hal yang baru, peneliti akan terlebih dahulu membuat atau menetapkan fokus penelitian pada area yang akan diteliti. Setelah fokus penelitian ditentukan maka akan ditentukan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

Berdasarkan latar belakang di atas maka fokus penelitian ini penulis batasi pada upah Angkut Kelapa Sawit dikaji dari

Hukum Ekonomi Syari'ah yang lokasi penelitiannya pada Lapak Sawit Panji Desa Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan.

#### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan pokok permasalahannya yang akan menjadi kajian selanjutnya yaitu:

1. Bagaimana Penetapan Upah Angkut Kelapa Sawit di Lapak Sawit Panji Desa Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Syari'ah Tentang Upah Angkut Kelapa Sawit di Lapak Sawit Panji Desa Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan?

#### **F. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian pada hakikatnya merupakan sesuatu yang hendak dicapai, yang dapat memberi arah terhadap penelitian yang akan dilakukan. Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Penetapan Upah Angkut kelapa sawit di Lapak Sawit Panji Desa Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan.
2. Untuk mengetahui Pandangan Hukum Ekonomi Syari'ah Tentang Upah Angkut Kelapa Sawit di Lapak Sawit Panji Desa Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan.

#### **G. Signifikansi Penelitian**

Manfaat atau kegunaan yang dapat tercapai dari aspek teoritis, dan aspek praktis adalah:

1. Secara teoritis hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan kompetensi keilmuan serta menambah pengetahuan di bidang Hukum Syari'ah.
2. Secara praktis, dapat dijadikan masukan bagi pihak yang aktivitasnya menggunakan jasa tenaga orang lain dengan memberi upah. Besaran ketentuan dan realisasi upah yang dibenarkan terkait Hukum Ekonomi Syari'ah.

## H. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Kajian penelitian terdahulu yang relevan adalah merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan informasi-informasi yang berkaitan dengan pokok masalah. Sampai saat ini, penulis belum menentukan kajian secara khusus membahas tentang Hukum Ekonomi Syari'ah Tentang Upah Angkut Kelapa Sawit. Namun beberapa dari skripsi sebelumnya ada sedikit pembahasan yang mirip dijadikan tinjauan pustaka dalam menyelesaikan skripsi ini. Berikut merupakan hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

1. Skripsi oleh Septiana Tri Lestari (2019) dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Upah Dalam Pembayaran Listrik. Dengan pokok pembahasan mengenai bagaimana pandangan hukum Islam tentang sistem upah antara petugas penagihan iuran listrik dengan warga. Dalam pembahasan skripsi ini menjelaskan bahwa sistem upah pembayaran listrik yang dilakukan dengan membulatkan besaran biaya upah pembayaran listrik dari warga dan dilakukan hanya sepihak saja tanpa adanya kesepakatan kedua belah pihak sehingga masyarakat merasa dirugikan karna sebelum adanya pembulatan sudah ada tambahan biaya- biaya yang lain nya.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Septiana Tri Lestari, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Upah Pembayaran Listrik*", (Skripsi program S1 Jurusan Muamalah Institut Agama Islam Negri Purwokerto, 2016)

2. Skripsi Rizky Puspita Cahyaning Putri (2019) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah tenaga kerja yang tidak sesuai dengan upah minimum kabupaten bekasi”. Dengan pokok pembahasan mengenai bagaimana pokok pandangan hukum Islam tentang praktik upah mengupah antara majikan dengan buruh. Dalam pembahasan skripsi ini bahwa dalam penerapannya adalah terdapat penyimpangan dari ketentuan perjanjian awal. Dalam perjanjian awal antara majikan dengan buruh tidak sesuai dengan besaran gaji yang diterima buruh dengan apa yang telah ditetapkan di awal perjanjian. Adanya perubahan tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam, tanpa adanya kesepakatan kedua belah pihak, yang menyebabkan pihak lain merasa dirugikan dan termasuk perbuatan *dzalim*, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam bahwa bermuamalah harus adil dan atas keridhan kedua belah pihak.<sup>4</sup>
3. Skripsi Siti Maesaroh (2019) dari UIN Raden Intan Lampung yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul” Studi di Desa Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan. Penelitiannya menarik beberapa permasalahan yaitu: bagaimana praktik upah kerja buruh cangkul yang terjadi di Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan. Metode yang digunakan adalah kualitatif dan jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan (*field research*). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan di tempat penelitian yaitu masyarakat Desa Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan. Berdasarkan penelitian yang telah dijabarkan maka kesimpulannya bahwa dalam praktik upah kerja buruh cangkul yang di tangguhkan belum memenuhi syarat dalam akad upah

---

<sup>4</sup> Rizky Puspita Cahyaning Putri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap upah tenaga kerja yang tidak sesuai dengan upah minimum kabupaten bekasi”, (Skripsi program S1 Jurusan Muamalah Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung, 2016)



kerja, sebab upah yang menjadi objek pembayaran belum jelas berapa banyak padi yang akan di terima oleh buruh cangkul dan terdapat unsur ketidakpastian atau *gharar* yang dalam Islam dilarang keberadaannya karena mudharatnya lebih besar dirasakan oleh para buruh dari pada kemaslahatannya.<sup>5</sup>

Berdasarkan literature diatas belum ada penelitian yang membahas secara khusus tentang Hukum Ekonomi Syari'ah Tentang Upah Angkut Kelapa Sawit. Penulis lebih menekankan kepada Praktik Penetapan upah-mengupah antara pemilik lapak sawit dengan kuli angkut. Dengan demikian penelitian ini layak untuk dilakukan dan terhindar dari duplikasi.

## I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka guna mengumpulkan informasi atau data untuk menjawab permasalahan peneliti atau rumusan masalah :

Jenis Penelitian dan sifat penelitian

### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *field research*, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan dengan megunjungi langsung ketempat yang dijadikan objek penelitian oleh penulis.<sup>6</sup> Penelitian lapangan dimaksudkan untuk mempelajari secara instensif tentang latar belakang keadaan dan posisi objek saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial

---

<sup>5</sup>Siti Maesaroh, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul", (Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum UIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2019), h. 11.

<sup>6</sup>Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Maju Mundur, 1996), h.81

tertentu yang bersifat apa adanya yang didapat dari lokasi penelitian.<sup>7</sup>

Adapun yang menjadi objek penelitian di sini adalah tentang upah angkut kelapa sawit di Lapak Sawit PanjiDesa Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan dilihat dari Hukum Ekonomi Syari'ah.

## b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti untuk selanjutnya dianalisis dan membuat kesimpulan.

## 1. Sumber data penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

### a. Data Primer (*Primary Data*)

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti. Dalam hal ini data yang diperoleh merupakan data dari pemilik Lapak Kelapa Sawit dan para Kuli Angkut Kelapa Sawit.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber yang bersifat membantu atau menunjang untuk melengkapi dan memperkuat serta memberi penjelasan mengenai sumber data dan primer. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian.

## 2. Populasi

Dalam penelitian populasi digunakan untuk menyebutkan keseluruhan subjek yang akan menjadi sasaran objek

---

<sup>7</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h.54-55

penelitian.<sup>8</sup> Dalam penelitian ini, berhubung lapak sawit yang adadi Desa Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan hanya lapak sawit panji, maka penelitian ini dikatakan penelitian populasi, dalam hal yang jadi objek atau responden penelitian berjumlah 11 orang yang terdiri dari 10 kuli angkut dan 1 pemilik Lapak kelapa sawit yang menetapkan upah para kuli angkut.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah data. Maka untuk teknik pengumpulan data diperlukan adalah wawancara, dan komunikasi.

#### a. Wawancara (Interview)

Interview atau wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan proses tanya jawab lisan (verbal), di mana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik.<sup>9</sup> Untuk memperoleh data, di sini penulis melakukan wawancara dengan para narasumber seperti pemilik lapak dan Para kuli angkut.

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan sebagainya.<sup>10</sup> Adapun yang menjadi buku utama penulis dalam mengumpulkan data adalah buku-buku fiqh muamalah serta dokumen-dokumen yang diperoleh di lapangan.

---

<sup>8</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 130

<sup>9</sup> Susiadi, *Metodologi Penelitian Hukum* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbit LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h.4

<sup>10</sup> Suharsimi Arikanto, *Prosedur Suatu Pendekatan Politik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 188

#### 4. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu setelah semua data terkumpul baik lapangan maupun perpustakaan kemudian diolah secara sistematis sehingga menjadi hasil pembahasan dan gambaran data. Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

a. Pemeriksaan data (*editing*),

Yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah terkumpul. Dalam proses *editing* dilakukan pengoreksian data terkumpul sudah cukup lengkap dan sesuai atau relevan dengan masalah yang dikaji.

b. Rekonstruksi data (*reconstruction*)

Yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, sesuai logika dan mudah dipahami.

c. Sistematis data (*systemaizing*)

Yaitu menetapkan data menurut kerangka sisteman batasan berdasarkan urutan masalah/variable penelitian.<sup>11</sup> Dalam hal ini penulisan mengelompokkan data secara sistematis dari yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi urutan masalah.

#### 5. Analisa Data

Data yang telah dikumpulkan dan diperoleh menggunakan metode kualitatif dianalisis dengan landasan teori secara deskriptif analisis kualitatif dengan pendekatan induktif. Indukif yaitu dimulai dari data yang terkumpul, kemudian diambil secara umum melalui mentranskip data dari hasil wawancara serta membuat rangkuman, pemrosesan, kategorisasi, tabulasi, dan inferensi. Setelah analisis data sesuai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu suatu penjelasan dan penginterpretasikan secara logis dan

---

<sup>11</sup>Noer Saleh dan Musanet, *Pedoman Membuat Skripsi* (Jakarta: Gunung Agung, 1989), h.16

sistematis. Dari hasil tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang ada.

Metode berpikir deduktif adalah metode analisis data dengan cara bermula dari data yang bersifat umum tersebut, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>12</sup> Adapun yang penulis analisis adalah tentang upah angkut kelapa sawit yang ditinjau dari hukum ekonomi syariah (muamalah).

## **J. Sistematika Pembahasan**

Pada penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan guna memudahkan penelitian. Dengan demikian penulisan membagi ke dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut :

### **Bab I Pendahuluan**

Yang terdiri dari penegasan judul, alasan memilih judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan masalah, signifikasi penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

### **Bab II Landasan Teori**

Menjelaskan tentang pengertian dan dasar hukum upah (*ujroh*), rukun dan syarat-syarat upah (*ujroh*) , macam-macam upah (*ujroh*), kewajiban dan hak para pihak, sistem pengupahanpelaksanaan dan gugurnya upah (*ujroh*), berakhirnya akad upah (*ujroh*) .

### **Bab III Deskripsi Objek Penelitian**

Membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian yaitu sejarah singkat Desa Negeri Besar, kondisi geografis dan demografis, sejarah berdirinya lapak sawit panji, serta praktik upah angkut kelapa sawit di lapak sawit panji.

---

<sup>12</sup> Surisno Hadi, *Metodelogi Research* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1984), h. 42

#### Bab IV Analisis Data

Membahas tentang hasil penelitian yaitu praktik upah angkut kelapa sawit di lapak sawit panji, dan hukum ekonomi syari'ah tentang upah angkut kelapa sawit di lapak sawit panji.

#### Bab V Penutup

Penutup merupakan bab akhir yang berisikan kesimpulan dan saran.





## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian dan Dasar Upah (*Ujroh*)

##### 1. Pengertian Upah (*Ujroh*)

Upah (*ujroh*) dalam Bahasa Arab sering disebut dengan *ajrun* dan *ajrn* yang berarti hadiah atau upah. Kata *ajrn* mengandung dua arti, yaitu balasan atas pekerjaan dan pahala. Upah menurut istilah, Upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberikan imbalan menurut syarat-syarat tertentu. Upah adalah pemberian imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.<sup>1</sup>

Menurut Taqi al-Din al-Nabhani, *ujroh* ialah kepemilikan harta seseorang yang dikontrak tenaganya (pekerja) oleh orang yang mengontrak tenaganya (majikan), dimana *ujroh* merupakan transaksi terhadap jasa tetapi dengan disertai kompensasi (imbalan).<sup>2</sup>

Dalam pandangan syariat Islam upah adalah hak dari seseorang yang telah bekerja dan kewajiban orang yang mempekerjakan untuk membayarnya.<sup>3</sup> Upah merupakan hak dari seseorang buruh atas tenaga yang telah disumbangkan dalam proses produksi dan pemberi kerja wajib membayarnya.

Upah adalah sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberikan pekerjaan kepada seorang pekerja atau

---

<sup>1</sup>Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung), h. 23

<sup>2</sup>Idris, *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Prespektif Hadis Ekonomi)*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 55

<sup>3</sup>M. Yazid Affandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka). h. 165

jasanya sesuai perjanjian. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa upah adalah harga yang dibayar kepada pekerja atau jasanya dalam bidang produksi atau faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atau jasanya dengan kata lain upah adalah harga dari tenaga yang dibayarkan atas jasa dalam produksi.<sup>4</sup> Jika pekerja tidak menerima upah akan mempengaruhi standar penghimpunan bagi para pekerja.

Penetapan upah bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadilan, dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, sehingga pandangan Islam tentang hak tenaga kerja dalam menerima upah lebih terwujud. Upah yang diberikan kepada seseorang harus sebanding dengan kegiatan-kegiatan yang telah dikeluarkan, seharusnya juga cukup bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan hidup yang wajar.

Pemberian upah hendaknya berdasarkan akad (kontrak) perjanjian kerja. Karena akan menimbulkan hubungan kerjasama antara pekerja dengan majikan atau pengusaha yang berisi hak-hak atas kewajiban masing-masing pihak. Hak dari pihak yang satu merupakan suatu kewajiban bagi pihak yang lainnya, adanya kewajiban yang utama bagi majikan adalah membayar upah.

Akad yang sesuai dengan syari'ah adalah yang tidak mengandung *gharar* (ketidakpastian atau penipuan), *maysir* (perjudian), *riba* (bunga uang), *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat. Perjanjian akad mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat. Ini merupakan dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian kita. Melalui akad ini kita bisa melakukan berbagai kegiatan bisnis dan usaha kita dapat dijalankan.

Seseorang lelaki dan perempuan saat disatukan dalam menjalani kehidupan dengan akad. Dengan adanya akad dapat

---

<sup>4</sup>Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam jilid Kedua*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 361

memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhi tanpa bantuan dan jasa orang lain. Dapat dibenarkan bahwa akad adalah merupakan sarana sosial yang ada dan hidup dalam kehidupan bermasyarakat dengan makhluk sosial.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa betapa kehidupan kita tiada lepas dari akad (perjanjian), yang menjadikan sarana dalam memenuhi berbagai bentuk kepentingan. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa betapa pentingnya akad (perjanjian).<sup>5</sup>

Adanya kaidah-kaidah dalam hukum kontrak (kesepakatan) dapat dibagi menjadi dua macam yaitu tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum kontrak tertulis adalah kaidah-kaidah yang terdapat diperaturan perundang-undangan dan yurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum yang tidak tertulis adalah kaidah hukum yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat, konsep-konsep hukum berasal dari hukum adat.

Ada beberapa prinsip perjanjian (kesepakatan) yang menjadi acuan dan pedoman secara umum untuk kegiatan muamalah. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:

a. Muamalat Adalah Urusan Duniawi

Muamalah berbeda dengan ibadah. Dalam ibadah, semua perbuatan dilarang kecuali yang diperintahkan. Oleh karena itu semua perbuatan yang dikerjakan harus sesuai dengan tuntunan yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Dalam ibadah, kaidah yang berlaku adalah:

---

<sup>5</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 114

أَلَا صَلُّ فِي الْعِبَادَاتِ اتَّقِيفَ وَالْإِتْبَاعُ<sup>6</sup>

*“Pada dasarnya dalam ibadah harus menunggu (perintah) dan mengikuti”.*

Sebaliknya dalam muamalat, semuanya boleh kecuali ada yang dilarang. Muamalat atau hubungan dan pergaulan antara sesama manusia di bidang harta benda merupakan urusan duniawi, dan pengaturannya diserahkan kepada manusia itu sendiri. Oleh karena itu, semua bentuk akad dan berbagai cara transaksi yang dibuat oleh manusia hukumnya sah dan dibolehkan asal tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syara’, hal ini sesuai dengan kaidah:

الْأَصْلُ فِي الْعُقُودِ وَالْمَعَامَلَاتِ الصَّحْتُ حَتَّى يَفُوتَ دَلِيلٌ  
عَلَى الْبُطْلَانِ وَالْتَّحْرِيمِ.<sup>7</sup>

*“Pada dasarnya Semua akad dan muamalat hukumnya sah sehingga ada dalil yang membatalkannya dan mengharamkannya”.*

Kaidah diatas mengandung arti bahwa hukum Islam memberikan kesempatan luas bagi perkembangan bentuk dan jenis muamalah (bisnis) baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, termasuk didalamnya kegiatan transaksi ekonomi di lembaga keuangan syariah.<sup>8</sup>

- b. Muamalat Harus Didasarkan Kepada Persetujuan Dan Kerelaan Kedua Belah Pihak

<sup>6</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Fiqhiyyah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), h.23

<sup>7</sup> *Ibid*, h. 24

<sup>8</sup> Mardani, *Hukum Bisnis Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 31

Dalam melakukan transaksi yang dilakukan oleh para pihak didasarkan pada kerelaan kepada semua pihak yang membuatnya.<sup>9</sup> Persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi merupakan asas yang sangat penting untuk keabsahan setiap akad. Hal ini didasarkan kepada firman Allah dalam surat An-Nisa [4]: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا  
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ  
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*“Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu”. (Q.S. An-Nisa:29).<sup>10</sup>*

Ayat ini kemudian diambil suatu kesimpulan yang mirip suatu kaidah yang berlaku dalam bidang mumalat yang berbunyi:

الرَّضَاسِيْدُ الْأَحْكَامِ<sup>11</sup>

*“Kerelaan merupakan dasar semua hukum (muamalat)”.*

Untuk menunjukkan adanya kerelaan dalam setiap akad atau transaksi dilakukan ijab dan qabul atau serah terima antara kedua pihak yang melakukan transaksi.

<sup>9</sup>Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Prespektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana,2016), h. 79

<sup>10</sup>Dapartemen Agama RI, *Al-Qur'an Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*, (Tangerang: PT. Kalim, 2011). h. 84

<sup>11</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Fiqhiyyah.....*, h. 23

c. Adat Kebiasaan Dijadikan Dasar Hukum

Dalam masalah muamalat, adat kebiasaan bisa dijadikan dasar hukum, dengan syarat adat tersebut diakui dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syara. Hal ini sesuai dengan kaidah:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ<sup>12</sup>

*“Adat kebiasaan digunakan sebagai dasar hukum”.*

Kaidah ini didasarkan pada hadist Nabi SAW:

إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَجَعَلَهُمْ وَرَاءَهُ، يَقَاتِلُونَ عَلَى  
دِينِهِ، فَمَرَّ أَيْ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، مَرَضَ أَيْ الْمُسْلِمُونَ  
حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ<sup>13</sup>

*“Sesungguhnya Allah melihat hati hamba-hamba-Nya setelah nabi Muhammad SAW maka Allah menjumpai hati para sahabat merupakan hati yang terbaik lalu dijadikanlah mereka sebagai pendamping nabi-Nya yang berperang di atas agama-Nya. Maka sesuatu yang oleh muslim dipandang baik, maka di sisi Allah juga dianggap baik. Dan apa yang dipandang oleh kaum muslimin sebagai kejelekan maka ia di sisi Allah adalah sebagai sebuah kejelekan”.*

d. Tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain

Setiap transaksi dan hubungan perdata (muamalat) dalam Islam tidak boleh menimbulkan kerugian kepada diri sendiri dan orang lain. Muamalah dilakukan dengan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat menghindarkan mudharat atau sering disebut juga masalah. Konsekuensi prinsip ini adalah segala bentuk muamalah yang merusak

<sup>12</sup> Abdul Mudjib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih (Al-Qowa'idul Fiqhiyyah)*, (Jakarta: Kalam Milia, 2001), h.43

<sup>13</sup> *Ibid*, h. 44



atau mengganggu kehidupan masyarakat tidak dibenarkan seperti perjudian, penjualan narkoba, prostitusi, dan sebagainya.

Hal ini didasarkan pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Daruqutni, dan lain-lain dari Abi Sa'ad Al-Khudri, bahwa Rasulullah Saw bersabda:

لَا ضَرَّارَ وَلَا ضَرَّارَ<sup>14</sup>

*“Jangan merugikan diri sendiri dan janganlah merugikan orang lain”.*

Berdasarkan hadist diatas ini dibuatlah kaidah kulliyah yang berbunyi:

الضَّرَّارُ يُزَالُ<sup>15</sup>

*“Kemudaratan harus dihilangkan”.*

Definisi hukum kesepakatan atau kontrak merupakan sumber perikatan dan persetujuan salah satu syarat sah kesepakatan. Kesepakatan adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat atau menimbulkan akibat hukum.<sup>16</sup>

Upah juga dapat memegang peranan penting yang merupakan salah satu ciri suatu hubungan kerja, bahkan upah dapat dikatakan tujuan utama dari seseorang pekerja melakukan pekerjaan pada orang atau badan hukum yang lain. Jadi upah adalah imbalan yang telah menyelesaikan pekerjaan dengan jumlah yang telah disepakati antara kedua belah pihak yang telah melakukan

<sup>14</sup> *Ibid*, h. 45

<sup>15</sup> *Ibid*, h. 46

<sup>16</sup> Salim H.S, *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Kontrak)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003). h. 4

perjanjian.<sup>17</sup> Hak untuk menerima upah timbul pada saat adanya hubungan kerja dan berakhir pada hubungan kerja putus.

Pengertian tersebut dapat dipahami bahwa upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam bidang produksi atau faktor produksi lainnya.

## 2. Dasar Upah (*Ujroh*)

### a. Al-Qur'an

Al-Qur'an Surat Al-Qashsh ayat 26-27 disebutkan :

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْبَىٰ اسْتَعْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَعْجَرْتَ  
الْقَوَى الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ بِكَ بِمَا كُنْتَ إِحْدَى الْأُنثَىٰ  
هَاتِيْنِ عَلَيَّ أَنْ تَأْجُرْنِي ثُمَّ نَفِيَّ حُجُجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ  
عِنْدِكَ ۖ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۚ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ  
مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

*"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". Berkatalah dia (Syuaib): "Sesungguhnya Aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu*

---

<sup>17</sup>Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014). h. 15

kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah (Q.S Al-Qasas : 26-27)<sup>18</sup>

Ayat di atas menerangkan bahwa upah (*Ujroh*) telah disyariatkan oleh umat Islam, dalam ayat ini terdapat pernyataan seorang anak yang diucapkan kepada ayahnya untuk mengambil seorang untuk bekerja dan memberikan imbalan yang telah disepakati sesuai dengan ketentuan waktu dan manfaat yang dapat diterima oleh ayah tersebut.

- a. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233 disebutkan :

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ  
الرِّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا  
تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ  
بَوْلِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزِعُوا  
أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

*“Para ibu hendaknya anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita*

<sup>18</sup>Dapartemen Agama RI, *Al-Qur'an Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*....,

*kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan. Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan". (Q.S. Al-Baqarah : 233).<sup>19</sup>*

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam membayar upah kepada pekerja harus sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Jika kalian menghendaki agar bayi-bayi kalian diserahkan kepada wanita-wanita yang bersedia menyusui, maka hal ini boleh dilakukan.

Tetapi kalian harus memberi upah yang pantas kepada mereka, apabila upah diberikan tidak sesuai maka akadnya menjadi tidak sah, pemberi kerja hendaknya tidak curang dalam pembayaran upah harus sesuai dan jelas agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dari kedua belah pihak.<sup>20</sup>

b. Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ  
حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ



<sup>19</sup>Ibid h. 38

<sup>20</sup>Ahmad Musthofa Al-maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, (Semarang: CV Toha Putra, cet Pertama, 1984), h.350

*“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.* (Q.s An-Nahl: 97).<sup>21</sup>

Ayat tersebut menjelaskan balasan atau imbalan bagi mereka yang beramal saleh adalah imbalan dunia dan imbalan akhirat. Maka seseorang yang bekerja disuatu badan usaha (perusahaan) dapat dikategorikan sebagai amal saleh, dengan syarat perusahaannya tidak memproduksi, menjual atau mengusahakan barang-barang yang haram. Dengan demikian, maka seorang buruh yang bekerja dengan benar akan mendapat dua imbalan, yaitu imbalan di dunia dan imbalan di akhirat.

#### c. As-Sunnah

As-Sunnah adalah perkataan (sabda), perbuatan ketetapan dan persetujuan dari nabi Muhammad yang dijadikan landasan syariat Islam. As-Sunnah dijadikan sumber hukum Islam selain Al-Qur'an. dalam hal ini As-Sunnah merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an.

Selain ayat Al-Qur'an di atas, ada beberapa hadits yang menegaskan tentang upah-mengupah (*ujroh*), hadits Rasulullah SAW menegaskan:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا  
الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

*“Berikanlah upahnya kepada seorang pekerja sebelum keringatnya kering”.* ( H.R Ibnu Majah ).<sup>23</sup>

<sup>21</sup>Dapartemen Agama RI, *Al-Qur'an Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka...*, h. 279

<sup>22</sup>Muhammad Ibn Yazid Ibn Majah, *Sunan Ibnu Majah, Jilid 1* ( Bogor: Syarikatul Quds). h. 302

Syarat agar upah dalam transaksi *ujroh* disebutkan secara jelas dan diberitahukan berapabesar atau kecilnya upah pekerja. Hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُسَمِّ لَهُ أَجْرَ تَهْ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ<sup>24</sup>

“Dari Abu Sa'id Al khudri ra. bahwasanya Nabi SAW bersabda, Barang siapa memperkerjakan pekerja maka tentukanlah upahnya.” (H.R Abdurrazaq).<sup>25</sup>

Sabda Rasulullah :

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَجْرِ الْحُجَّامِ فَقَالَ: اخْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ وَأَعْطَاهُ صَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ. رَوَاهُ ابْنُ خَارِشٍ. (رَوَاهُ ابْنُ خَارِشٍ وَمُسْلِمٌ)<sup>26</sup>

“Dari Annas ra. Sesungguhnya ketika ditanya mengenai upah dari pekerjaan membekam, dia mengatakan: “Rasulullah SAW. Dibekam oleh Abu Thaibah, dan beliau memberinya imbalan sebanyak dua sha' makanan”. (H.R Bukhori).<sup>27</sup>

Allah memusuhi orang-orang yang melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, seperti dalam hadis yang diriwayatkan Muslim, sebagai berikut :

---

<sup>23</sup> Al Hafidh Ibnu Hajar, *Terjemah Bulughul Maram (Ibnu Hajar Asqalani)* cet I,

( Jakarta: Pustaka Amani, 1995). h. 188

<sup>24</sup> Jalaluddin Abdurahman As Suyuti, *Jamius Shaghir Fi Ahadits Al Basyir An Nadir*, (Surabaya: Darul Kutub Ilmiyah). h. 360

<sup>25</sup> Al Hafidh Ibnu Hajar, *Terjemah Bulughul Maram (Ibnu Hajar Asqalani)* cet I.,

h. 178

<sup>26</sup> Muhammad Faud Abdul Baqi, *Al-Lu 'Lu' Wal Marjan Mutiara Hadis Sahih Bukhari dan Muslim*, (Jakarta: Gramedia, 2017), h. 105

<sup>27</sup> Al Hafidh Ibnu Hajar, *Terjemah Bulughul Maram (Ibnu Hajar Asqalani)* cet I., h. 106



وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي  
 ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ جِيرًا فَ  
 سَتَوَفَى مِنْهُ وَلَمْ يَعْطِهِ أَجْرَهُ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)<sup>28</sup>

*“Abu Hurairah ra. Berkata, Rasulullah saw. Bersabda, “Tiga golongan yang aku musuhi kelak di hari kiamat ialah: seseorang yang memberi perjanjian dengan nama-Ku, kemudian ia khianat, seseorang yang menjual orang merdeka dan menikmati hasilnya, dan seseorang yang memperkerjakan kuli, lalu pekerja itu bekerja dengan baik namun ia tidak memenuhi upahnya.” (HR Muslim).<sup>29</sup>*

Upah merupakan salah satu hak normatif buruh, Upah yang diterima oleh buruh merupakan bentuk prestasi dari pengusaha ketika buruh itu sendiri telah memberikan prestasi pula kepada pengusaha yakni suatu pekerjaan yang telah dilakukan.

Bab 1 Pasal 1 angka 30 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menegaskan:

Upah adalah hak pekerja/atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/jasa yang telah atau akan dilakukan.<sup>30</sup>

<sup>28</sup>Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, no 2227 (Berikut: Dar Ibn Katsir, 2002), h. 531

<sup>29</sup>Al Hafidh Ibnu Hajar, *Terjemah Bulughul Maram (Ibnu Hajar Asqalani) cet I...*, h. 531

<sup>30</sup>Undang-undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Tujuan pemerintah mengatur upah dan pengupahan pekerja/buruh adalah untuk melindungi pekerja dari kesewenang-wenangan pengusaha dalam pemberian upah. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pekerja menerima upah dari pemberi kerja secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak dan dilindungi oleh undang-undang. Peran pemerintah dalam hal ini adalah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh agar dapat memenuhi kebutuhan hidup pekerja maupun keluarganya.

Berdasarkan uraian tentang dasar hukum atau dalil-dalil syara' dan juga dasar perundang-undangan yang berkenaan dengan masalah pengupahan (*ujroh*) sebagaimana telah diuraikan diatas, maka tidak ada lagi keraguan tentang kebolehan mengadakan transaksi upah mengupah, dengan kata lain upah mengupah diperbolehkan dalam hukum Islam maupun perundang-undangan apabila bernilai secara syar'i dan tidak merugikan pihak pekerja/buruh.

## **B. Syarat dan Rukun Upah (*Ujroh*)**

### **1. Syarat Upah (*Ujroh*)**

Dalam hukum islam syarat sahu*ujroh* sebagai berikut:

- a. Adanya kerelaan kedua belah pihak yang berakad, karena upah harus dilakukan dengan dasar kerelaan dari kedua belah pihak yang melakukan perjanjian dan bukan karena keterpaksaan.
- b. Besaran upah harus merujuk pada kesepakatan kedua belah pihak yang berakad. Upah harus dilakukan dengan musyawarah dan konsultasi yang terbuka, sehingga dapat terwujudnya di dalam diri para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang ada pada mereka.

- c. Upah harus diberikan sesegera mungkin atau sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam akad.
- d. Upah yang diberikan berupa harta tetap yang dapat diketahui.
- e. Upah harus berupa *mal-mutaqawin* dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas.<sup>31</sup> Konkrit atau dengan menyebutkan kriteria-kriteri. Karena upah merupakan pembayaran atas nilai manfaat, nilai tersebut disyaratkan harus diketahui dengan jelas. Mempekerjakan orang dengan upah makan, merupakan contoh upah yang tidak jelas karena mengandung unsur jihalah (ketidak pastiaan).
- f. Upah harus beda dengan obyeknya, mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan yang serupa, merupakan contoh yang tidak memenuhi persyaratan ini. Karena itu hukumnya tidak sah, karena dapat mengantarkan pada praktek riba.<sup>32</sup> Misalnya mepekerjakan kuli angkut membangun rumah dan upahnya berupa bahan bangunan atau rumah.

## 2. Rukun Upah

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Misalnya rumah, terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu pondasi, tiang, lantai, dinding, atap dan seterusnya. Dalam konsep Islam unsur-unsur yang membentuk itu disebut rukun.<sup>33</sup>

Ahli-ahli hukum mazhab Hanafi, menyatakan bahwa rukun akad hanyalah *ijab* dan *qabul* saja, mereka mengakui bahwa tidak mungkin ada akad tanpa adanya para pihak yang membuatnya dan tanpa adanya objek akad. Mereka mengatakan: Adapun upah mengupah adalah *ijab* dan *qabul*, sebab seperti apa yang telah kamu ketahui terdahulu bahwa

---

<sup>31</sup>Ghufran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada,2006), h.186

<sup>32</sup>*Ibid*, h.186-187

<sup>33</sup>Muhammad Al Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah...*, h. 303

yang dimaksudkan dengan rukun adalah apa-apa yang termasuk dalam hakekat, dan hakekat upah mengupah adalah sifat yang dengannya tergantung kebenarannya (sahnya) upah mengupah itu tergantung padanya, seperti pelaku akad dan objek akad. Maka ia termasuk syarat untuk terealisasinya hakekat upah mengupah.

Jadi menurut ulama Hanafiyah rukun upah mengupah ada dua yaitu *ijab* dan *qabul*. Hal ini disebabkan para ulama Hanafiyah mempunyai pendapat tersendiri tentang rukun. Mereka beranggapan yang dimaksud dengan rukun adalah sesuatu yang berkaitan dengan sahnya suatu transaksi, yang dalam hal ini adalah akad upah mengupah itu sendiri.

Adapun menurut Jumah Ulama, rukun *ujroh* ada (4) empat, yaitu :

a. *Aqid* (orang yang berakad)

Yaitu orang yang melakukan akad upah mengupah. Orang yang memberikan upah (majikan) dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu pekerjaan.<sup>34</sup>

Karena begitu pentingnya kecakapan bertindak itu sebagai persyaratan untuk melakukan sesuatu akad, maka golongan Syafi'iyah dan Hanabilah menambahkan bahwa mereka yang melakukan akad itu harus orang yang sudah dewasa dan tidak cukup hanya sekedar *mumayyiz* saja.<sup>35</sup>

b. *Sighat*

Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut *sighat* akad (*sighatul- 'aqd*), terdiri atas *ijab* dan *qabul*. Dalam Hukum perjanjian Islam *ijab* dan *qabul* dapat melalui: 1) ucapan, 2) utusan dan tulisan, 3) isyarat, 4) secara diam-diam, 5) dengan diam semata. Syarat-syaratnya

<sup>34</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*,h.117

<sup>35</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalat*, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada,2007). h. 95

sama dengan *ijab* dan *qabul* pada jual beli, hanya saja *ijab* dan *qabul* dalam *ijarah* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.

c. Upah

Yaitu sesuatu yang diberikan kepada pekerja atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh majikan. Dengan syarat hendaknya:

- 1) Sudah jelas atau sudah diketahui jumlahnya. Karena itu *ujroh* tidak sah dengan upah yang belum diketahui.
- 2) Pegawai khusus seperti seorang hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. Jika dia mengambil gaji dua kali dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan saja.

d. Manfaat

Untuk mengontrak atau memperkerjakan seorang pekerja harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya. Oleh karena itu jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena transaksi upah yang masih kabur hukumnya adalah *fasid*.<sup>36</sup>

Perjanjian sah dan mengikat adalah perjanjian yang memenuhi insur-unsur dan syarat-syarat yang ditetapkan undang-undang. Perjanjian yang sah dan mengikat diakui dan memiliki akibat hukum (*legally concluded contract*). Menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPdt, setiap perjanjian selalu memiliki empat unsur melekat syarat-syarat yang ditentukan undang-undang.

a. Persetujuan Kehendak

Unsur subjek, minimal ada dua pihak dalam perjanjian yang mengadakan persetujuan kehendak (*ijab*

---

<sup>36</sup>*Ibid*, h. 232

*kaabul*) antara pihak yang satu dan pihak yang lain. Kedua pihak dalam perjanjian harus memenuhi syarat-syarat kebebasan menyatakan kehendak, tidak ada paksaan, penipuan, dan kekhilafan satu sama lain.

Persetujuan kehendak adalah persepakatan seia sekata antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lainnya.

b. Kewenangan (Kecakapan)

Unsur subjek (kewenangan berbuat), setiap pihak dalam perjanjian wenang melakukan perbuatan hukum menurut undang-undang. Pihak-pihak yang bersangkutan harus memenuhi syarat-syarat, yaitu sudah dewasa, artinya sudah berumur 21 tahun penuh, walaupun belum 21 tahun penuh, tetapi sudah pernah kawin; sehat akal (tidak gila); tidak dibawah pengampuan; dan memiliki surat kuasa apabila mewakili pihak lain.

c. Objek (Prestasi) Tertentu

Unsur objek (prestasi) tertentu atau dapat ditentukan berupa memberikan suatu benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud; melakukan suatu perbuatan tertentu atau tidak melakukan perbuatan tertentu. Suatu objek tertentu atau prestasi tertentu merupakan objek perjanjian, prestasi wajib dipenuhi.

d. Tujuan perjanjian

Unsur tujuan, yaitu apa yang ingin dicapai pihak-pihak itu harus memenuhi syarat halal. Tujuan perjanjian yang akan dicapai pihak-pihak itu sifatnya harus halal artinya tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan masyarakat.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 1993). h. 299



Perjanjian yang tidak memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat seperti yang ditentukan diatas tidak akan diakui oleh hukum walaupun diakui oleh pihak-pihak yang membuatnya, tetapi tidak mengikat, artinya tidak wajib dilaksanakan. Apabila dilaksanakan juga, sampai suatu ketika ada pihak yang tidak mengakuinya dan menimbulkan sengketa. Apabila diajukan ke pengadilan, pengadilan akan membatalkan atau menyatakan perjanjian itu batal.

### C. Macam-macam Upah (*Ujroh*)

Di dalam fiqih mu'amalah upah dapat diklasifikasikan menjadi dua :

#### 1. Upah yang sepadan (*ujroh al-mitsli*)

Upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaanya (profesi kerja) jika akad telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya. Sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemberi kerja dan penerima kerja pada saat pembelian jasa.

Maka dengan itu untuk menentukan tarif upah atas kedua belah pihak yang melakukan transaksi pembelian jasa tetapi belum menentukan upah yang disepakati maka mereka harus menentukan upah yang wajar sesuai dengan pekerjaannya atau upah yang dalam situasi normal biasa diberlakukan dan sepadan dengan tingkat jenis pekerjaan tersebut. Tujuan ditentukannya tarif upah sepadan adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak.

Bisa dilihat dari segi objeknya, akad *ujroh* adalah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *ujroh* seperti ini menurut ulama fikih, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik dan buruh tani. Pekerja adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga, jasa

dan lain-lain, kemudian majikan adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. Pekerja mendapatkan upah atas tenaga yang ia keluarkan untuk majikan mendapatkan tenaga atau jasa dari pekerja.

2. Upah yang telah disebutkan (*ujroh al-musamma*)

Upah yang sudah disebutkan itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang berakad. Dengan demikian, pihak majikan tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, sebagaimana pihak pekerja (buruh) juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan upah yang lebih kecil dari apa yang telah disebutkan.

Melainkan upah tersebut merupakan upah yang wajib mengikuti ketentuan syara', apabila upah tersebut disebutkan pada saat melakukan transaksi, maka upah tersebut pada saat itu merupakan upah yang disebutkan. Apabila belum disebutkan ataupun terjadi perselisihan terhadap upah yang telah disebutkan, maka upahnya diberlakukan upah yang sedapan.

Adapun pada awalnya jenis upah terbatas dalam beberapa jenis saja, tetapi setelah terjadi perkembangan dalam bidang mu'amalah pada saat ini, maka jenisnya pun sangat beragam, diantaranya :

1. Upah mengajar Al-Qur'an

Pada saat ini para fuqaha menyatakan bahwa boleh mengambil upah dari pengajaran al-Qur'an dan ilmu-ilmu syari'ah lainnya, karena para guru membutuhkan penunjang kehidupan mereka dan kehidupan orang-orang yang berada dalam tanggungan mereka. Dan waktu mereka juga tersita untuk kepentingan pengajaran al-Qur'an dan ilmu-ilmu syari'ah tersebut,

maka dari itu diperbolehkan memberikan kepada mereka sesuatu imbalan dari pengajaran ini.<sup>38</sup>

Menurut Mazhab Hambali, boleh mengambil upah dari pekerjaan-pekerjaan mengajarkan Al-Qur'an dan sejenisnya, jika tujuannya termasuk mewujudkan kemaslahatan. Tetapi haram hukumnya mengambil upah jika tujuannya termasuk kepada takabur kepada Allah.

Menurut Mazhab Maliki, Safi'I dan Ibnu Hazm membolehkan mengambil upah sebagai imbalan mengajar Al-Qur'an dan kegiatan-kegiatan sejenis, karena hal ini termasuk jenis imbalan dari perbuatan yang diketahui (terukur) dan dari tenaga yang diketahuinya pula.

Ibnu Hazm bahwa mengambil upah sebagai imbalan mengajar Al-Qur'an dan kegiatan sejenis, baik secara bulanan atau secara sekaligus dibolehkan dengan alasan tidak ada hush yang melarangnya.

## 2. Upah menyusui anak

Mengupah ibu menyusui anaknya yang dimaksud adalah bukan ibu kandungnya, karena seorang laki-laki tidak boleh mengupah istrinya untuk menyusui anaknya sendiri karena ini merupakan suatu kewajiban atasnya dalam hubungan anatara dia dan Allah SWT.<sup>39</sup>

Dalam al-Qur'an sudah disebutkan bahwa diperbolehkan memberikan upah bagi orang yang menyusukan anak, sebagaimana yang tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 233 :

---

<sup>38</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Penerjemah Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara CetI, 2006), h. 22

<sup>39</sup>*Ibid*, h. 155

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ  
مَاءَ آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ



*“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al-Baqarah : 233).<sup>40</sup>*

### 3. Perburuhan

Buruh adalah orang yang menyewakan tenaganya kepada orang lain untuk dikaryakan berdasarkan kemampuannya dalam suatu pekerjaan.

### 4. Mengupah orang dengan imbalan pakaian dan makanan

Abu Hanafi membolehkan dalam konteks jasa menyusui oleh selain pembantu (pelayan). Sedangkan imam Syafii, Abu Yusuf, Muhammad Hadiwiyah dan Al-Manshur Billah berpendapat tidak sah karena upah yang akan diterima dianggap tidak konkret.

Mazhab Maliki membolehkan untuk memperkerjakan pekerja dengan imbalan makanan yang dimakannya dan pakaian yang dipakainya berpendapat bahwa hal itu disesuaikan dengan tradisi yang berlaku.

<sup>40</sup>Dapartemen Agama RI, *Al-Qur'an Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka...*

## D. Kewajiban dan Hak Masing-Masing Pihak

### 1. Kewajiban pemberi kerja dan buruh

Pada dasarnya semua yang dipekerjakan untuk pribadi dan kelompok harus mempertanggungjawabkan pekerjaan masing-masing. Sekiranya terjadi kerusakan atau kehilangan, maka dilihat dahulu permasalahannya, apakah ada unsur kelalaian atau kesengajaan atau tidak. Jika tidak, maka tidak perlu dimintai penggantian, dan jika ada unsur kelalaian atau kesengajaan, maka dia harus mempertanggungjawabkannya, apakah dengan cara mengganti atau sanksi lainnya.

Pemberi kerja harus bertanggung jawab atas pemberian upah kepada pekerjanya, memperlakukan pekerja dengan baik serta berlaku adil dalam pemberian upah, begitu juga dengan buruh hendaklah bertanggung jawab atas pekerjaannya yang ia terima dari pemberi kerja dan diselesaikan dengan baik.

Sekiranya menjual jasa itu untuk kepentingan orang banyak seperti tukang jahit dan tukang sepatu, maka ulama berbeda pendapat. Imam Abu Hanifah, Zufar bin Huzail dan Syafi'i berpendapat, bahwa apabila kerusakan itu bukan karena unsur kesengajaan dan kelalaian, maka pekerja itu tidak dituntut ganti rugi.<sup>41</sup>

Abu yusuf dan dan Muhammad bin Hasan asy-syaibani (murid Abu Hanifah), berpendapat bahwa, pekerja itu ikut bertanggung jawab atas kerusakan tersebut, baik sengaja atau tidak. Berbeda dengan kerusakan itu diluar batas kemampuannya seperti banjir besar atau kebakaran.

Menurut Mazhab Maliki apabila sifat pekerjaan itu membekas pada barang itu seperti barang binatu, juru masak, dan buruh angkut (kuli), maka baik sengaja atau tidak sengaja

---

<sup>41</sup>M. Ali Hasan, *Berbagi Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2003), h. 231

segala kerusakan menjadi tanggung jawab pekerja itu wajib ganti rugi.<sup>42</sup>

## 2. Hak pemberi kerja dan buruh

Setiap seseorang yang melakukan akad harus sesuai dengan ketentuan dan memenuhi hak masing-masing, antara pemberi kerja dan buruh.

- a. Pemberi kerja harus memberikan upah dan buruh berhak untuk menerima upah.
- b. Pemberi kerja berhak untuk menuntut buruh apabila pekerja tidak menyelesaikan tugasnya sedangkan upahnya sudah ia terima dan pekerja (buruh) wajib menyelesaikan pekerjaannya.
- c. Pemberi kerja harus adil dalam memperkerjakan buruh dan memenuhi hak-hak antara kedua belah pihak.
- d. Memungkinkan manfaat jika masanya berlangsung, ia memungkinkan mendatangkan manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi keseluruhannya.
- e. Mempercepat dalam bentuk pelayanan atau kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan syarat, yaitu mempercepat bayaran.<sup>43</sup>

## E. Sistem Pengupahan, Pelaksanaan Upah dan Gugurnya Upah

### 1. Sistem pengupahan

*Ujroh* kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak di syaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya. Secara umum dalam ketentuan Al-Qur'an yang berkaitan dengan penentuan upah kerja ini terdapat dalam surat An-Nahl ayat 90 :

---

<sup>42</sup>*Ibid*, h. 234

<sup>43</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ  
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

*“sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan”. (Q.S An-Nahl:90).<sup>44</sup>*

Apabila ayat ini diartikan dikaitkan dengan perjanjian kerja, maka dapat dikemukakan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada para pemberi pekerjaan untuk berlaku adil, berbuat adil dan dermawan kepada para pekerja. Kata kerabat diartikan sebagai karyawan, sebab para pekerja tersebut merupakan bagian dari perusahaan, seandainya bukan karena jerih payahnya tidak mungkin usaha majikan itu bisa berhasil. Oleh karena itu maka kewajiban simajikan adalah untuk mensejahterakan pekerjaanya, termasuk dalam hal membayar upah yang layak.

Jika dalam persyaratan perjanjian kerja ada ditentukan syarat yang telah disetujui bersama, bahwa upah pekerja dibayar sebulan sekali, maka majikan wajib memenuhi syarat tersebut yaitu membayar upah pekerja sebulan sekali. Namun jika dalam persyaratan perjanjian kerja yang telah disetujui bersama bahwa upah pekerja dibayar seminggu sekali, maka majikan harus membayar upah pekerja seminggu sekali mengikuti persyaratan perjanjian kerja yang mereka buat dan setuju bersama.<sup>45</sup>

Menurut mazhab Hanafi bahwa upah tidak dibayarkan hanya dengan adanya akad, boleh untuk

<sup>44</sup>Dapartemen Agama RI, *Al-Qur'an Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka...*, h.43

<sup>45</sup>Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 157



memberikan syarat mempercepat atau menangguhkan upah. Seperti mempercepat sebagian upah dan menangguhkan sisanya, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Masalah penundaan pembayaran upah ada ditentukan penundaan upah adalah sah, tidaklah hal itu membatalkan dalam perjanjian yang diadakan sebelumnya. Penundaan upah secara sewenang-wenang kepada pekerja dilarang dalam Islam, akan tetapi harus disegerekan. Jika dalam kesepakatan tidak terdapat kesepakatan mempercepat atau menangguhkan, sekiranya upah itu bersifat dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya masa tersebut.<sup>46</sup>

## 2. Pelaksanaan Upah

Pelaksanaan upah ini dipengaruhi oleh faktor-faktor yang saling berkaitan. Adapun faktor-faktor tersebut adalah :

### a. Bentuk dan Jenis Pekerjaan

Menentukan bentuk dan jenis pekerjaan sekaligus menentukan siapa pekerja yang akan melakukan pekerjaan tersebut adalah penting, agar dapat diketahui seberapa besar kadar pengorbanan yang dikeluarkan. Juga disyaratkan agar ketentuan bisa menghilangkan kekaburan persepsi sehingga transaksi *ujroh* tersebut berlangsung secara jelas. Setiap transaksi *ujroh* disyaratkan harus jelas. Apabila ada unsur kekaburan, maka status hukumnya tidak sah.

#### 1) . Masa Kerja

Berdasarkan segi masa kerja yang ditetapkan, transaksi *ujroh* dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, yaitu sebagai berikut :

a) Ada transaksi yang hanya menjelaskan takaran pekerjaan yang yang dikontrak saja tanpa harus menyebutkan masa kontrak/kerja, seperti pekerjaan

---

<sup>46</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah* Penerjemah Nor Hasanuddin..., h. 209

menjahit pakaian dengan model tertentu sampai selesai. Maka berapapun lamanya seorang pekerja harus menyelesaikan pakaian tersebut.

- b) Ada transaksi *ujroh* yang hanya menyebutkan masa kerja tanpa harus menyebutkan takaran kerja. Contohnya: pekerjaan memperbaiki bangunan selama satu bulan. Bila demikian orang tersebut harus memperbaiki bangunan selama satu bulan, baik bangunan tersebut selesai diperbaiki maupun tidak.

Ada transaksi *ujroh* yang menyebutkan masa kerja sekaligus menyebutkan takaran kerja. Misalnya, pekerjaan membangun rumah yang harus selesai dalam waktu tiga bulan.<sup>47</sup>

## 2) . Upah Kerja

Ada syarat juga agar upah dalam transaksi *ujroh* disebutkan secara jelas. Hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda :

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ خُذْرِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ اسْتَأْجَرَ اجْبِرًا فَلَيْسَ لَهُ أَجْرٌ تَهُ .  
(رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ)<sup>48</sup>

“Dari Abu Sa'id Al khudri ra. bahwasanya Nabi SAW bersabda, Barang siapa memperkerjakan pekerja maka tentukanlah upahnya.” (H.R Abdurrazaq).<sup>49</sup>

Hadis diatas memberikan pemahaman tentang tata cara bagaimana kita melakukan akad *ujroh* khususnya terkait dengan jumlah upah yang akan dibayarkan. Penegasan upah dalam kontrak kerja merupakan

<sup>47</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani,2011), h. 391

<sup>48</sup>Hafidh Ibnu Hajar, *Bulughul Maram, Bab Al-Ijrah...*,h. 188

<sup>49</sup>Al Hafidh Ibnu Hajar, *Terjemah Bulughul Maram (Ibnu Hajar Asqalani) cet I...*,  
h. 189

sesuatu yang harus diketahui, hal ini untuk mencegah terjadinya perselisihan dikemudian hari.

Jika kewajiban dari pekerja sudah dipenuhi kepada majikan, maka untuk itu hak pekerja tidak boleh diabaikan tanpa memberikan gaji sesuai waktu yang dijanjikan untuk memenuhi haknya sebagai pekerja. Sepanjang ia tidak menyalahi mengerjakan pekerjaan diwajibkan kepadanya, karena ia disewa sebagai pekerja, serta diberi gaji. Pekerja berhak mendapat bayaran gaji secara penuh walau terpaksa terjadi penundaan waktu pembayaran gaji. Tidak boleh dikurangi dari jumlah yang sudah diperjanjikan.

Seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat antar mereka, kecuali syarat-syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Namun, jika ia membolos bekerja tanpa alasan yang benar atau sengaja menunaikannya dengan tidak semestinya, maka sepatutnya hal itu diperhitungkan, karena setiap hak dibarengi dengan kewajiban.

Selama ia mendapatkan upah secara penuh, maka kewajibannya juga harus dipenuhi. Syekh Qaradawi mengatakan bahwa bekerja yang baik merupakan kewajiban karyawan atas hak upah yang diperolehnya, demikian juga memberikan upah merupakan kewajiban perusahaan atas hak hasil kerja karyawan yang diperolehnya.

### 3) . Tenaga Yang Dicurahkan Saat Bekerja

Transaksi *ujroh* dilakukan seorang pekerjadengan sorangmajikan atas jasa dari tenagayang dicurahkan, sedangkan upahnya ditentukan berdasarkan jasa yang diberikan. Adapun berapa besar tenaga yang dicurahkan bukanlah standar upah

seseorang serta standar dari besarnya jasa yang diberikan. Besarnya upah akan berbeda dengan adanya perbedaan nilai jasa, bukan perbedaan jerih payah atau tenaga yang dicurahkan.

Sementara itu jerih payah (tenaga) tersebut secara mutlak tidak pernah dinilai dengan menentukan besarnya upah meskipun memang benar bahwa jasa dalam suatu pekerjaan adalah karena hasil jerih payah, namun yang diperhatikan adalah jasa (manfaat) yang diberikan bukan sekedar tenaga, meskipun tenaga tersebut tetap diperlukan.

Dalam transaksi *ujroh* haruslah ditetapkan tenaga yang harus dicurahkan oleh pekerja, sehingga pekerja tersebut tidak dibebani dengan pekerjaan yang berada diluar kepastiannya. Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah : 286 :



*“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya.” (Q.S Al-Baqarah :286).<sup>50</sup>*

Karena itu, tidak diperbolehkan untuk menuntut seorang pekerja agar mencurahkan tenaganya kecuali sesuai dengan kapasitas kemampuannya yang wajar. Karena tenaga tersebut tidak mungkin dibatasi dengan takaran yang baku, membatasi jam kerja dalam sehari adalah takaran yang lebih mendekati pembatasan

---

<sup>50</sup>Dapartemen Agama RI, *Al-Qur'an Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka...*, h.57

tersebut sehingga pembatasan jam kerja sekaligus merupakan tindakan pembatasan tenaga yang harus dilakukan oleh seorang majikan.

Syari'at Islam menganjurkan agar upah yang diterima oleh tenaga kerja, sesuai dengan tenaga yang telah diberikan. Tenaga kerja tidak boleh dirugikan, ditipu dan dieksploitasi tenaganya, karena mengingat keadaan sosial tenaga kerja pada posisi perekonomian lemah. Gaji harus dibayar atau dihargai sesuai dengan keahlian masing-masing pekerja. Hal itu sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Ahqaf:19 yaitu :

وَلِكُلِّ دَرَجَتٌ مِّمَّا عَمِلُوا ۖ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَلَهُمْ وَهُمْ لَا

يُظْلَمُونَ ﴿١٩﴾

*“Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.” (Q.S Al-Ahqaf:19).<sup>51</sup>*

Dapatlah dikatakan bahwa tenaga kerja berhak menerima gaji sesuai keahlian dan kemampuannya walaupun terjadi penundaan. Penundaan yang dilakukan tidak boleh mengurangi gaji yang telah tertunda. Harus sesuai dengan yang diperjanjikan tidak boleh dikurangi sedikitpun. Ketika pada suatu saat orang yang mengupah atau yang diupah itu meninggal dunia, maka itu tidak membatalkan akad pengupahan.

### 3. Gugurnya Upah

Kematian orang yang mengupah atau yang diupah tidak membatalkan akad pengupahan, jika orang yang mengupah meninggal dan permintaannya sudah dikerjakan oleh orang

---

<sup>51</sup>Ibid, h. 76

yang diupah, maka keluarganya wajib memberikan upah kepada buruh tersebut, tetapi kalau buruh tersebut meninggal sebelum menerima upahnya maka ahli waris yang menerima upah tersebut. Namun bila buruh meninggal sebelum menyelesaikan pekerjaannya urusannya ditangan tuhan.<sup>52</sup>

Gugurnya upah karena kerusakan barang penyewaan pekerjaan, jika barang di bawah kekuasaan buruh, maka terdapat dua hal berikut:

- a. Jika pekerjaan itu memiliki hasil yang jelas pada fisik barang, seperti menjahit, mewarnai dan memutihkan kain, maka wajib memperoleh upah dengan penyerahan hasil yang diminta, tetapi jika barangnya rusak ditangan pekerja sebelum adanya penyerahan, maka upahnya hilang (gugur).
- b. Jika pekerjaan tersebut tidak memiliki hasil yang jelas dalam fisik barang, seperti tukang panggul dan pelaut, maka wajib memperoleh upah dengan hanya menyelesaikan pekerjaannya, sekalipun belum menyerahkan fisik barang kepada pemiliknya.

Ulama hanafiah berpendapat gugurnya upah disebabkan oleh:

- a. Jika benda ditangan pekerja
  - a) Jika ada bekas pekerjaan, pekerja berhak mendapatkan upah sesuai bekas pekerjaan tersebut.
  - b) Jika tidak ada bekas pekerjaannya, pekerja tidak berhak mendapatkan upah atas pekerjaannya sampai selesai.
  - c) Jika berada di tangan majikan, pekerja berhak mendapatkan upah setelah selesai bekerja.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, h. 121

<sup>53</sup>Sayid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah* Penerjemah Nor Hasanuddin..., h. 27

## F. Berakhirnya Akad Upah (*Ujroh*)

Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad *ujroh* akan berakhir apabila :

1. Objek hilang atau musnah, seperti baju yang dijahitkan hilang.
2. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *ujroh* telah berakhir. Maka dia berhak menerima upahnya. Hal ini disepakati oleh seluruh ulama fiqh.<sup>54</sup>
3. Menurut ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad, karena akad *ujroh*, menurut mereka, tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad *ujroh* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad, karena manfaat, menurut mereka boleh diwariskan dan *ujroh* sama dengan jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.
4. Menurut ulama Hanafiyah, apabila ada uzur dari salah satu pihak, Uzur-uzur yang dapat membatalkan akad *ujroh* adalah salah satu pihak jatuh mufis, dan berpindah tempatnya, misalnya seseorang digaji untuk menggali sumur di suatu desa, sebelum sumur itu selesai penduduk desa itu pindah ke desa lain. Akan tetapi, menurut jumhur ulama, uzur yang boleh membatalkan akad *ujroh* itu hanyalah apabila obyeknya mengandung cacat atau manfaat yang dituju dalam akad itu hilang, seperti kebakaran dan banjir.
5. Pekerjaan telah selesai kecuali ada uzur atau halangan.

---

<sup>54</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*..., h. 85



## DAFTAR RUJUKAN

### 1. AL-QUR'AN

Dapartemen Agama RI, *Al-Qur'an Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*, Tangerang: PT.Kalim, 2011

### 2. BUKU

Affandi, M. Yarid, *Fiqih Muamalah dan Implementasinya dalam lembaga keuangan syaria'ah*, Yogyakarta: Logung Pustaka

Al-Albani, Muhammad. *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007

Al-Bukhari, Muhammad Bin Ismail. *Shahih Al-Bukhari*, No 2227 Berikut: Dar Ibn Katsir, 2002

Al-maraghi, Ahmad Musthofa. *Tafsir Al-Maraghi*, Semarang: CV Toha Putra, cet Pertama, 1984

Al-Hafid, *Terjemah Bulughul Maram Ibnu Hajr Al-Asqalani*, cet I, Jakarta: Pustaka Amani, 1995

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syaria'ah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Suatu Pendekatan Politik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011

Baqi, M Faud Abdul. *Al-Lu 'Lu' Wal Marjan Mutiara Hadis Sahih Bukhari dan Muslim*, Jakarta: Gramedia, 2017

Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2002

Data Umum Kampung Negeri Besar, 2019

- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004
- Hamid, Arifin. *Membumikan Ekonomi Syari'ah di Indonesia*, Jakarta: Pramuda Jakarta, 2008
- Hasan, M Ali. *Berbagi Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: GrafindoPersada, 2003
- Husni, Lalu. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Idris. *Hadis Ekonomi (Dalam Prespektif Hadis Ekonomi)*, Jakarta: Kencana, 2015
- Ja'far, Kumedi. *Hukum Perdata Islam*, Bandar Lampung : PermatanetPublishing, 2016
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: MajuMundur, 1996
- Mardani, *Hukum Bisnis Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2014
- Mas'adi, Ghufuran A. *Fiqh Muamalah Kontektual*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002
- Muclish, Ahmad W. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Ainzah, 2010
- Mudjib, Abdul. *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih (Al-Qowa'idul Fiqhiyyah)*, Jakarta: Kalam Milia, 2001
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: PT CitraAditya Bakti, 1993
- Musanet, Noer saleh. *Pedoman Membuat Skripsi*, Jakarta: Gunung Agung, 1989
- Pasaribu, Chairuman. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam Jilid Kedua*, Jakarta: Raja WaliPers, 2013
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah, Penerjemah Nor Hasanuddin*, Jakarta: Pena Pundi Aksara Cet I, 2006
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 13*, Bandung: PT Alma'arif, 1987

Salim. *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Kontrak)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003

Susiadi. *Metodologi Penelitian Hukum*, Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbit LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015

Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010

Syafe'i, Rahmat. *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001

Undang-undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

### **3. SKRIPSI**

Septiana Tri Lestari, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Upah Pembayaran Listrik"*. (Skripsi program S1 Jurusan Muamalah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2016)

Rizky Puspita Cahyaning Putri, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap upah tenaga kerja yang tidak sesuai dengan upah minimum kabupaten bekasi"*, (Skripsi program S1 Jurusan Muamalah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2016)

Siti Maesaroh, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul"*, (Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum UIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2019)

### **4. WAWANCARA**

Agus (pekerja kuli angkut di lapak sawit panji), Wawancara dengan penulis, Negeri Besar, 5 April 2021

Alex (pekerja kuli angkut di lapak sawit panji), Wawancara dengan penulis, Negeri Besar, 5 April 2021

Eko (pekerja kuli angkut di lapak sawit panji), Wawancara dengan penulis, Negeri Besar, 5 April 2021

Endah (pekerja kuli angkut di lapak sawit panji), Wawancara dengan penulis, Negeri Besar, 5 April 2021

Gogon (pekerja kuli angkut di lapak sawit panji), Wawancara dengan penulis, Negeri Besar, 5 April 2021

Herman (pmilik lapak sawit panji), Wawancara dengan penulis, Negeri Besar, 5 April 2021

Maulana (pekerja kuli angkut di lapak sawit panji), Wawancara dengan penulis, Negeri Besar, 5 April 2021

Samusir (pekerja kuli angkut di lapak sawit panji), Wawancara dengan penulis, Negeri Besar, 5 April 2021

Sarnubi (pekerja kuli angkut di lapak sawit panji), Wawancara dengan penulis, Negeri Besar, 5 April 2021

Sodek (pekerja kuli angkut di lapak sawit panji), Wawancara dengan penulis, Negeri Besar, 5 April 2021

Sony (pekerja kuli angkut di lapak sawit panji), Wawancara dengan penulis, Negeri Besar, 5 April 2021

